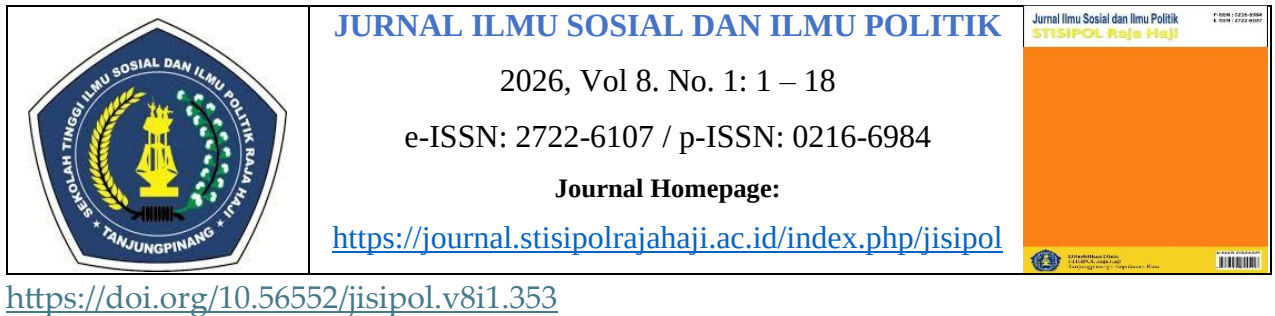




<https://doi.org/10.56552/jisipol.v8i1.353>

Peran Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Dalam Pengembangan Potensi Pariwisata Desa Pulosari Menjadi Desa Wisata Di Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung

¹Emi Novariza, ²Ujud Rusdia, ³Resti

^{1,2,3} Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP Universitas Bale Bandung, Jawa Barat, Indonesia

Corresponding Author: eminovariza1810@gmail.com

Abstract

The development of Pulosari Village as a tourist village still faces challenges related to the involvement and support of the Bandung Regency Culture and Tourism Office which is not evenly distributed in various tourist destinations. This study aims to analyze the role of the Bandung Regency Culture and Tourism Office in the development of Pulosari Village, Pangalengan District as a nature-based and community-based tourism village. This study uses a qualitative descriptive method with data collection techniques through observation, in-depth interviews, and documentation. The research informants included officials from the Culture and Tourism Office, village governments, and tourism managers in the Pulosari Village area. The results of the study show that the role of the Office includes three main aspects, namely as a motivator, facilitator, and dynamic. As a motivator, the Office plays a role in encouraging community participation through training and human resource development. As a facilitator, the Agency provides facilities, inter-agency coordination, and administrative support to facilitate tourism management. Meanwhile, as a dynamic, the Office functions to encourage cross-party collaboration, encourage tourism product innovation, and strengthen the network of cooperation between the government, the community, and business actors. However, the implementation of these three roles has not been evenly distributed in all tourist destinations in Pulosari Village. Offices are more active in certain areas such as Rahong, while some other destinations still rely on independent initiatives. This study concludes that strengthening the role of the Agency comprehensively and sustainably is the key to realizing an independent, innovative, and sustainable tourism village in Bandung Regency

Keywords: Department of Culture and Tourism, role of local government, facilitator, Tourism Village, Pulosari

PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan sektor yang memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya suatu daerah (Poni Sukaesih Kurniati, 2023). Aktivitas pariwisata tidak hanya mencakup perjalanan



wisatawan semata, tetapi juga melibatkan pengelolaan, pengembangan objek wisata, serta dukungan berbagai sektor usaha seperti perhotelan, transportasi, kuliner, dan jasa pendukung lainnya yang turut memperkuat industri pariwisata (Sri Endah Nurhidayati, 2025). Dengan demikian, sektor pariwisata mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, serta pelestarian nilai-nilai budaya dan lingkungan (Anggarini, 2021).

Salah satu bentuk pengembangan pariwisata yang kini semakin mendapatkan perhatian adalah desa wisata (I. Made Darma Oka, 2021). Desa wisata menawarkan pengalaman berwisata yang autentik dengan memadukan keindahan alam, budaya lokal, serta kehidupan masyarakat pedesaan. Lebih dari sekadar destinasi wisata, desa wisata berperan dalam memberdayakan masyarakat setempat, meningkatkan kesejahteraan, serta menjaga kelestarian lingkungan dan nilai-nilai tradisional (Syarifuddin, 2024). Berdasarkan data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif jumlah desa wisata di Indonesia terus meningkat, mencapai lebih dari 1.000 desa yang tersebar di berbagai provinsi. Fenomena ini menunjukkan bahwa desa wisata memiliki potensi besar untuk menjadi motor penggerak ekonomi lokal (Gratia Wirata Laksmi, 2024). Namun demikian, peningkatan jumlah desa wisata tidak selalu berbanding lurus dengan keberhasilan pengelolaan dan keberlanjutannya, baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun lingkungan.

Keberhasilan pengembangan desa wisata tidak terlepas dari tantangan yang dihadapi di lapangan. Tantangan-tantangan tersebut antara lain terkait dengan keterbatasan infrastruktur dasar, seperti akses jalan yang kurang memadai, jaringan listrik yang tidak stabil, dan fasilitas publik yang terbatas seperti dalam temuan penelitian milik (Sa'di, 2024) di Desa Tapak Kabupaten Magetan yang menjadikan kondisi tersebut sebagai penghambat akses wisatawan dan menurunkan kenyamanan berwisata. Selain itu, kualitas sumber daya manusia (SDM) juga menjadi kendala utama seperti dalam temuan penelitian (Benjiro Lepar, 2024) kurangnya tenaga kerja yang memiliki kompetensi di bidang pariwisata seperti pemandu wisata, pengelola akomodasi, dan pelaku kuliner menyebabkan pelayanan wisata kurang optimal. Keterbatasan ini berdampak pada citra dan daya saing desa wisata di tingkat regional maupun nasional (Anik Widiastuti, 2019).



Selain faktor infrastruktur dan SDM, aspek promosi dan pemasaran juga menjadi masalah yang kerap dihadapi oleh desa wisata (Viona Amelia, 2025). Minimnya pemanfaatan teknologi digital dan media sosial menyebabkan potensi wisata belum tersampaikan secara luas kepada masyarakat, baik di tingkat nasional maupun internasional. Padahal, dengan strategi pemasaran digital yang tepat melalui kolaborasi dengan agen perjalanan, *influencer*, maupun platform daring desa wisata dapat meningkatkan visibilitas dan menarik lebih banyak wisatawan seperti yang dilakukan di Desa Mekarlaksana Kabupaten Bandung (Deviana Safitri, 2025).

Namun demikian, pengembangan pariwisata tidak hanya berfokus pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan semata, tetapi juga harus memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan dan budaya (Margaretha, 2024). Eksploitasi sumber daya alam tanpa perencanaan yang matang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan seperti deforestasi, pencemaran air, dan degradasi lahan. Demikian pula, budaya lokal yang menjadi daya tarik utama berisiko kehilangan nilai autentiknya jika dikomersialisasikan secara berlebihan. Oleh karena itu, pengelolaan pariwisata harus mengedepankan prinsip pariwisata berkelanjutan yang menyeimbangkan antara pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam serta budaya lokal (Bambang Suharto, 2024).

Selain dampak lingkungan dan budaya, ketergantungan ekonomi masyarakat terhadap sektor pariwisata juga dapat menimbulkan risiko sosial dan ekonomi (Abdul Khair, 2025). Ketika terjadi penurunan kunjungan wisatawan akibat faktor eksternal seperti bencana alam, perubahan iklim, atau pandemi, perekonomian desa dapat terganggu secara signifikan. Untuk itu, strategi diversifikasi ekonomi melalui pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berbasis potensi lokal perlu dikembangkan agar desa tetap memiliki ketahanan ekonomi yang stabil.

Keberlanjutan desa wisata juga bergantung pada tingkat partisipasi masyarakat lokal (Ade Jafar Sidiq, 2017). Rendahnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata sering kali menyebabkan kurangnya rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap keberlangsungan program wisata. Apabila masyarakat hanya menjadi penonton, manfaat ekonomi dari kegiatan pariwisata tidak akan terdistribusi secara merata dan bahkan dapat menimbulkan kesenjangan sosial. Oleh karena itu, penguatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan, pendampingan, dan akses terhadap modal



menjadi bagian penting dalam pengembangan desa wisata yang inklusif dan berkelanjutan (Meyranda Syahputra, 2025). Keberlanjutan desa wisata juga bergantung pada tingkat partisipasi masyarakat local. Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam pengelolaan destinasi sehingga manfaat ekonomi maupun sosial dapat dirasakan secara lebih merata. Temuan ini juga diperkuat oleh penelitian Mandala et al. (2022) yang menunjukkan bahwa strategi pengembangan pariwisata berbasis masyarakat memerlukan keterlibatan aktif masyarakat dalam mengembangkan potensi wisata lokal agar pengembangan destinasi berlangsung secara berkelanjutan.

Dalam konteks tersebut, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung memiliki peran yang sangat penting dalam merancang kebijakan, memberikan pembinaan, serta mengembangkan infrastruktur dan promosi pariwisata daerah. Peran dinas ini tidak hanya terbatas pada fungsi administratif, tetapi juga sebagai fasilitator dan katalisator dalam menghubungkan berbagai pemangku kepentingan agar tercipta sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku industri pariwisata.

Kabupaten Bandung sendiri dikenal memiliki potensi wisata yang tinggi dengan keindahan alam dan kekayaan budaya yang khas. Beberapa destinasi unggulannya antara lain Kawah Putih di Ciwidey, Situ Patenggang, Nimo Highland, Jembatan Rengganis, dan Glamping Lakeside Rancabali (Dinas Pariwisata Kabupaten Bandung, 2023). Namun, potensi besar tersebut masih dihadapkan pada berbagai kendala seperti keterbatasan infrastruktur, kurangnya promosi, minimnya fasilitas publik, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam promosi pariwisata.

Salah satu wilayah yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan adalah Desa Pulosari di Kecamatan Pangalengan. Desa ini memiliki kekayaan alam berupa perbukitan hijau, kebun teh, dan aliran sungai yang potensial untuk dijadikan daya tarik wisata alam. Beberapa destinasi unggulan di Desa Pulosari antara lain wisata arung jeram di Sungai Palayangan, area berkemah di Muara Rahong Hills, Alam Singkur, Soracai Riverside Campsite, dan Namu Hejo yang menawarkan pengalaman glamping modern di tengah alam. Selain itu, nilai budaya dan tradisi masyarakatnya yang masih terjaga menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang mencari pengalaman autentik.



Namun demikian, potensi besar tersebut memerlukan dukungan nyata dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung dalam hal perencanaan, pengembangan infrastruktur, pendampingan masyarakat, serta promosi yang berkelanjutan agar Desa Pulosari dapat berkembang menjadi destinasi wisata unggulan yang berdaya saing tinggi. Dengan dukungan kebijakan dan program yang tepat, Desa Pulosari berpeluang menjadi contoh keberhasilan pengembangan desa wisata yang mampu mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan secara harmonis. Dalam tiga tahun terakhir sendiri, jumlah pengunjung ke Desa Pulosari terus mengalami peningkatan signifikan. Data dari Dinas Pariwisata Kabupaten Bandung menunjukkan pertumbuhan kunjungan wisatawan sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Pengunjung yang datang ke Objek Wisata Pulosari
Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung

Tahun	Jumlah Wisatawan
2001	10.500 wisatawan
2022	15.800 wisatawan
2023	21.300 wisatawan

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Bandung, 2023.

Berdasarkan data tersebut, terlihat memang jumlah pengunjung tercatat terus mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan daya tarik yang terus berkembang dari Desa Pulosari sebagai destinasi wisata. Selain itu, dampak dari adanya peningkatan jumlah wisatawan juga dapat menunjukkan identifikasi bahwa pengembangan Desa Wisata di Pulosari mampu memberikan dampak positif, baik dalam aspek ekonomi maupun pelestarian lingkungan. Dengan semakin banyaknya wisatawan yang berkunjung, tentunya diperlukan strategi pengelolaan yang lebih baik untuk menjaga keseimbangan antara eksploitasi sumber daya alam dan upaya pelestariannya.

Desa Pulosari di Kecamatan Pangalengan merupakan salah satu contoh desa yang memiliki daya tarik wisata alami dan buatan yang terus berkembang. Selain itu, desa ini juga dikenal memiliki kepedulian tinggi terhadap pelestarian lingkungan, yang dibuktikan dengan diraihnya Penghargaan Kalpataru tahun 2017 dan penghargaan sebagai Desa Wisata Rintisan tahun 2023 dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung.



Namun, di balik capaian tersebut, pengembangan Desa Pulosari masih menghadapi berbagai kendala. Berdasarkan observasi awal, tantangan utama Desa Pulosari meliputi keterbatasan infrastruktur, kurangnya promosi digital, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan destinasi wisata. Peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung dalam pendampingan, pembinaan kelembagaan, dan promosi terpadu juga dinilai belum optimal. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi yang dimiliki desa dengan kapasitas pengelolaannya.

Secara normatif, pengembangan desa wisata telah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Desa Wisata, yang menekankan pentingnya pengelolaan berbasis masyarakat, keberlanjutan lingkungan, dan pelestarian budaya lokal. Meski demikian, implementasi di tingkat desa sering kali menghadapi kendala koordinasi antar pihak, keterbatasan sumber daya manusia, serta belum terbangunnya model pengelolaan yang efektif dan berkelanjutan.

Padahal apabila merujuk kepada beberapa penelitian sebelumnya menegaskan bahwa keberhasilan pengembangan desa wisata sangat bergantung pada peran aktif pemerintah daerah dalam membangun kolaborasi lintas sektor dan meningkatkan partisipasi masyarakat (Marlina, 2019). Namun dalam hal ini, kajian yang secara khusus menelaah peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung dalam mengembangkan Desa Pulosari sebagai desa wisata masih terbatas.

Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis peran dinas pariwisata dalam pengembangan potensi Desa Pulosari, termasuk strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan keberlanjutan pariwisata. Kebaruan penelitian (*novelty*) ini terletak pada fokusnya terhadap integrasi antara peran kelembagaan pemerintah daerah dan partisipasi komunitas lokal dalam mewujudkan model pengembangan desa wisata yang berdaya saing dan berkelanjutan di tingkat daerah.

Berdasarkan berbagai kajian terdahulu, penelitian mengenai pengembangan desa wisata umumnya menitikberatkan pada aspek pemberdayaan masyarakat, pengelolaan potensi wisata, serta strategi pemasaran dan keberlanjutan lingkungan. Sejumlah studi juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha dalam

mengembangkan destinasi wisata berbasis komunitas. Namun demikian, sebagian besar penelitian tersebut lebih banyak membahas desa wisata dari perspektif manajemen destinasi atau partisipasi masyarakat, sementara kajian yang secara khusus menganalisis peran kelembagaan pemerintah daerah, khususnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, dalam mendorong pengembangan desa wisata di tingkat lokal masih relatif terbatas, terutama pada konteks Kabupaten Bandung dan Desa Pulosari sebagai lokus penelitian. Kondisi ini menunjukkan adanya *research gap* terkait bagaimana peran pemerintah daerah dijalankan secara konkret dalam fungsi motivator, fasilitator, dan dinamisator dalam pengembangan desa wisata. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung dalam pengembangan Desa Pulosari di Kecamatan Pangalengan sebagai desa wisata berbasis alam dan masyarakat, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas peran tersebut dalam mendukung keberlanjutan pengembangan pariwisata desa.

KAJIAN PUSTAKA

Peran

Secara terminologis, *peran* dapat dipahami sebagai seperangkat perilaku, fungsi, dan tanggung jawab yang diharapkan dari seseorang atau lembaga dalam suatu sistem sosial. Menurut Soekanto dalam (Raintung, 2021) peran merupakan aspek dinamis dari status sosial, yakni ketika individu atau institusi melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat. Dalam konteks kelembagaan pemerintahan, peran berkaitan dengan bagaimana sebuah instansi publik menjalankan fungsi, kewenangan, serta tanggung jawabnya dalam mencapai tujuan pelayanan publik dan pembangunan masyarakat. Sejalan dengan pandangan Robbins dan Judge dalam (Dewi, 2021), peran juga mencakup sejauh mana suatu entitas mampu memengaruhi perilaku dan partisipasi pihak lain dalam mencapai tujuan bersama secara efektif.

Dalam konteks pembangunan pariwisata daerah, teori Pitana dan Gayatri (2005) dalam *Sosiologi Pariwisata* menjelaskan bahwa pemerintah daerah memiliki tiga peran strategis, yaitu sebagai motivator, fasilitator, dan dinamisator. Sebagai motivator, pemerintah berperan menumbuhkan kesadaran dan semangat masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan potensi



wisata. Sebagai fasilitator, pemerintah menyediakan dukungan baik berupa kebijakan, infrastruktur, maupun sarana pengembangan kapasitas sumber daya manusia. Sementara sebagai dinamisator, pemerintah menjadi penghubung dan penggerak sinergi antara sektor publik, swasta, dan masyarakat agar pembangunan pariwisata berjalan secara kolaboratif dan berkelanjutan. Ketiga fungsi ini menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya sebagai pengatur, tetapi juga sebagai penggerak perubahan sosial melalui pemberdayaan dan kolaborasi lintas sektor.

Namun demikian, teori peran pemerintah daerah yang dikemukakan Pitana dan Gayatri masih bersifat normatif dan belum banyak dikaji dalam konteks empiris yang menyoroti dinamika *governance* lokal pada tingkat desa wisata. Kesenjangan teori muncul karena peran motivator dan dinamisator pemerintah daerah sering kali belum terukur secara konkret dalam mendorong partisipasi dan inovasi masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini menghadirkan keterbaruan teoritis (*novelty*) dengan menekankan fungsi motivasi sebagai energi sosial kelembagaan yang memperkuat kolaborasi, adaptasi, dan keberlanjutan desa wisata.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam dalam konteks alami (Waruwu, 2024), sesuai pandangan Creswell dan Moleong, sedangkan metode deskriptif bertujuan menggambarkan kondisi faktual di lapangan tanpa mencari hubungan antar variabel (Ramdhan, 2021). Fokus penelitian ini adalah menganalisis peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung dalam pengembangan potensi pariwisata di Desa Pulosari, Kecamatan Pangalengan.

Pemilihan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, yakni pemilihan berdasarkan pertimbangan bahwa individu yang dipilih memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dengan objek penelitian (Risnita Asrulla, 2023). Informan dalam penelitian ini terdiri dari pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung, perangkat Desa Pulosari, Ketua Pokdarwis, Ketua Paguyuban Riverside Rahong, pelaku wisata, serta beberapa wisatawan yang aktif berinteraksi dengan kegiatan pariwisata di Desa Pulosari.



Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran langsung mengenai pengelolaan dan aktivitas pariwisata di Desa Pulosari, sedangkan wawancara digunakan untuk menggali informasi mendalam dari para informan terkait strategi, program, dan kendala pengembangan wisata. Dokumentasi dilakukan melalui penelaahan arsip, foto, dan laporan kegiatan untuk mendukung validitas data (Siti Romdona, 2025). Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang dikutip dari (Anjarima Devitri Kase, 2023) yang mencakup tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung serta kawasan wisata Desa Pulosari, Kecamatan Pangalengan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Sebagai Motivator

Dalam perannya sebagai motivator, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung melaksanakan sejumlah program pembinaan dan pelatihan yang bertujuan meningkatkan kapasitas pengelola wisata di Desa Pulosari. Program tersebut meliputi pelatihan tata kelola desa wisata, pelayanan wisata (*grooming dan hospitality*), pendampingan Pokdarwis, serta sosialisasi keselamatan dan pelatihan P3K sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut:



Tabel 2. Realisasi Program Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai Motivator

No	Program	Keterangan
1	Pembinaan & pelatihan tata kelola desa wisata (sejak 2022)	Meningkatkan kapasitas pengelolaan, namun belum merata
2	Pelatihan pelayanan wisata	Meningkatkan kualitas layanan, belum menyeluruh
3	Pendampingan Pokdarwis & pengelola wisata	Dilakukan secara langsung, belum rutin
4	Sosialisasi keselamatan & pelatihan P3K	Bekerja sama dengan Dinas Kesehatan

Sumber: Hasil Olah Peneliti, 2025

Menurut Mita Garcinia (Jafung Adyatama Kepariwisata), program pelatihan tersebut merupakan bentuk motivasi konkret untuk memperkuat SDM dan membangun semangat pengelola dalam mengembangkan destinasi secara berkelanjutan. Hal senada disampaikan oleh Dian (Ketua Pokdarwis) dan Komarudin (Ketua Paguyuban Riverside Rahong), yang menilai pelatihan dari dinas memberi dorongan positif bagi pengelola, meski frekuensinya masih terbatas. Namun, Sekretaris Desa Pulosari, Devi Rizalul Fikri, menilai dukungan dinas masih bersifat insidental, muncul ketika ada event tertentu tanpa pembinaan rutin. Sejumlah pengelola destinasi seperti Dimas (Muara Rahong), Robi (Riverside Pineus Tilu), Ridwan (Alam Singkur), Pendi (Namu Hejo), Diki (Soracai Riverside), Irfan (Harmoni), dan Dodi (Artur Indonesia) mengonfirmasi bahwa pelatihan dari dinas belum merata, dan sebagian besar motivasi tumbuh dari inisiatif internal serta dukungan paguyuban.

Hasil temuan ini menunjukkan bahwa peran Dinas sebagai motivator masih belum optimal. Sebagaimana teori (Pitana, 2009), peran motivator seharusnya memberikan dorongan berkelanjutan dan pembinaan intensif agar pelaku wisata mampu mengembangkan potensi desa secara mandiri dan kompetitif. Namun, di Desa Pulosari, motivasi dinas masih bersifat sporadis dan belum menyentuh seluruh pengelola. Kondisi ini tidak sepenuhnya sejalan dengan amanat Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2022 tentang Desa Wisata, yang menekankan pentingnya pelatihan SDM dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan strategi



pembinaan yang lebih konsisten dan terarah agar Dinas benar-benar berperan sebagai penggerak utama dalam memotivasi pelaku wisata di Desa Pulosari.

Peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung sebagai Fasilitator

Sebagai fasilitator, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung berperan dalam memberikan kemudahan dan dukungan teknis terhadap pengembangan sarana serta prasarana wisata di Desa Pulosari, Kecamatan Pangalengan. Peran ini diwujudkan melalui koordinasi lintas sektor, pendampingan teknis, serta penyediaan akses terhadap sumber daya yang menunjang kegiatan wisata. Program yang direalisasikan antara lain Kabupaten/Kota Sehat di kawasan Muara Rahong Hills, fasilitasi penerangan jalan umum (PJU) dan dapur higienis, kerja sama dengan puskesmas untuk program wisata sehat, serta promosi destinasi melalui kegiatan tingkat kabupaten, sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 3. Realisasi Program Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai Fasilitator

No	Program	Keterangan
1	Program Kabupaten/Kota Sehat di Muara Rahong Hills	Fokus pada standarisasi fasilitas dasar
2	Fasilitasi PJU, dapur higienis, pemeriksaan air layak konsumsi	Terlaksana di Rahong, belum merata ke seluruh destinasi
3	Kerja sama dengan puskesmas (lokus wisata sehat)	Mendukung pelatihan P3K dan kebersihan lingkungan
4	Promosi wisata tingkat kabupaten	Promosi dilakukan, namun masih terbatas dan sporadis

Sumber: Hasil Olah Peneliti, 2025

Kembali, Menurut Mita Garcinia selaku (Jafung Adyatama Kepariwisataan), Dinas menjalankan peran fasilitator melalui program *Kabupaten/Kota Sehat* yang menekankan pentingnya fasilitas standar seperti toilet dan sarana kesehatan di lokasi wisata. Pernyataan ini sejalan dengan pandangan Pitana dan Gayatri (2005) yang menegaskan bahwa peran fasilitator dalam pengembangan pariwisata mencakup pemberian kemudahan akses, dukungan



teknis, dan pembimbingan agar masyarakat dapat berperan aktif dalam pengembangan destinasi. Namun, wawancara dengan Ketua Pokdarwis (Dian), Ketua Paguyuban Riverside Rahong (Komarudin), serta sejumlah pengelola wisata seperti Dimas (Muara Rahong), Robi (Riverside Pineus Tilu), dan Ridwan (Alam Singkur) menunjukkan bahwa pendampingan dari dinas masih bersifat insidental dan belum menjangkau seluruh kawasan. Sebagian besar fasilitas, termasuk akses jalan, mushola, toilet, dan area publik lainnya, masih dikelola secara mandiri oleh pengelola dengan dukungan paguyuban.

Hasil observasi menunjukkan bahwa peran fasilitator Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung belum berjalan optimal. Dukungan terhadap sarana dan prasarana masih terfokus pada beberapa destinasi tertentu, sementara koordinasi dengan pemerintah desa serta pendampingan teknis berkelanjutan belum konsisten. Kondisi ini belum sepenuhnya mencerminkan amanat **Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata** yang menegaskan kewajiban pemerintah daerah dalam penyediaan infrastruktur dan fasilitasi kerja sama lintas sektor. Oleh karena itu, Dinas perlu memperkuat perannya dengan mengembangkan sistem pendampingan reguler, membuka akses pendanaan yang lebih luas, serta meningkatkan sinergi dengan pelaku wisata dan pemerintah desa. Upaya tersebut akan menjadi fondasi penting dalam mewujudkan Desa Pulosari sebagai desa wisata yang berdaya saing, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat lokal.

Peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung sebagai Dinamisor

Sebagai dinamisor, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung berperan sebagai penggerak utama yang mendorong inovasi, kolaborasi, dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam pengembangan Desa Pulosari, Kecamatan Pangalengan. Peran ini tidak hanya menitikberatkan pada pelaksanaan program, tetapi juga pada upaya menciptakan suasana kondusif bagi munculnya gagasan kreatif dalam pengelolaan pariwisata. Melalui forum koordinasi lintas pihak, fasilitasi kerja sama dengan sektor swasta, pendampingan melalui paguyuban wisata, serta dukungan terhadap program wisata sehat, Dinas berusaha memperkuat kolaborasi antara masyarakat, pengelola wisata, pemerintah desa, dan pelaku usaha.



Tabel 4 Realisasi Program Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai Dinamisator

No	Program	Keterangan
1	Kolaborasi lintas pihak melalui forum koordinasi	Pernah dilaksanakan, belum rutin, berdampak di kawasan Rahong
2	Fasilitasi kerja sama dengan sektor swasta dan lembaga perbankan	Membuka peluang, namun kemitraan di Pulosari masih terbatas
3	Pendampingan teknis melalui paguyuban wisata	Efektif di Rahong, belum menjangkau semua destinasi
4	Dukungan inovasi wisata sehat (P3L, air bersih, P3K)	Terlaksana sebagian, belum menyeluruh
5	Fasilitasi perizinan dan koordinasi lintas instansi	Membantu kelancaran operasional wisata

Sumber: Hasil Olah Peneliti, 2025

Dalam hal ini, berdasarkan hasil wawancara bersama *informan key*, didapatkan bahwa Dinas menggerakkan kolaborasi lintas sektor pemerintah, akademisi, komunitas, dan pelaku usaha untuk mempercepat pengembangan desa wisata. Hal ini sejatinya sejalan dengan pandangan Pitana dan Gayatri (2009) bahwa peran dinamisator mencakup kemampuan memicu perubahan, menciptakan suasana inovatif, dan mendorong sinergi antar pihak. Namun, hasil wawancara dengan Ketua Pokdarwis (Dian), Ketua Paguyuban (Komarudin), serta beberapa pengelola seperti Dimas, Robi, dan Ridwan, menunjukkan bahwa peran Dinas sebagai penggerak inovasi masih belum merata. Dukungan pelatihan dan promosi wisata lebih banyak terpusat pada kawasan Rahong, sementara destinasi lain seperti Namu Hejo, Soracai Riverside, dan Harmoni masih mengandalkan inisiatif mandiri.

Temuan lapangan memperlihatkan bahwa peran dinamisator Dinas masih bersifat parsial dan belum sepenuhnya menggerakkan kolaborasi lintas sektor secara berkelanjutan. Dinas telah berperan dalam perizinan dan fasilitasi teknis, tetapi inovasi atraksi, promosi digital, dan pembinaan kelembagaan lokal masih lemah. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara praktik di lapangan dan teori ideal yang diungkapkan Pitana & Gayatri (2009). Sesuai Undang-



Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan serta Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2022 tentang Desa Wisata, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab mendorong terciptanya inovasi, kemitraan, dan daya saing destinasi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan peran dinamisator melalui pembinaan rutin, penguatan jejaring promosi, dan pengembangan inovasi wisata berbasis komunitas agar Desa Pulosari dapat tumbuh sebagai desa wisata yang mandiri, inovatif, dan berkelanjutan.

Komponen Potensi Pariwisata di Desa Pulosari Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung

Menurut (Sugiana, 2013), pengembangan pariwisata mencakup empat komponen utama yang saling berkaitan, yaitu atraksi, aksesibilitas, amenitas, dan kelembagaan. Keempat unsur tersebut juga membentuk dasar pengembangan Desa Pulosari sebagai destinasi wisata alam dan buatan di Kabupaten Bandung. Adapun analisis tersebut akan disajikan melalui tabel di bawah ini:

Tabel 5. Komponen Potensi Pariwisata di Desa Pulosari Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung

No	Komponen	Temuan
1	Atraksi	Temuan penelitian menunjukan bahwa daya tarik alam dan buatan yang menjadi alasan utama wisatawan berkunjung. Desa Pulosari menawarkan keindahan alam pegunungan, Sungai Palayangan yang populer untuk kegiatan arung jeram, serta destinasi buatan seperti Muara Rahong Hills, Riverside Pineus Tilu, Alam Singkur, Namu Hejo, Soracai Riverside, dan Harmoni. Atraksi-atraksi ini menggabungkan wisata alam, petualangan, dan rekreasi keluarga yang menjadi ciri khas pariwisata berbasis lingkungan di wilayah tersebut.
2	Aksesibilitas	Temuan penelitian menunjukkan tingkat kemudahan wisatawan mencapai lokasi. Secara umum, jalur utama menuju Desa Pulosari sudah memadai, dengan sebagian besar jalan beraspal atau berpaving block.



	Beberapa akses ke destinasi masih berupa jalan tanah karena berada di kawasan Perhutani, namun hal ini justru mempertahankan kesan alami desa wisata. Kendala yang muncul antara lain kemacetan saat akhir pekan dan keterbatasan perbaikan jalan akibat status lahan milik instansi lain.
3 Amenitas	Temuan mencakup fasilitas penunjang wisata seperti penginapan, toilet, mushola, kafe, area api unggun, dan area parkir. Sebagian besar destinasi di Pulosari telah menyediakan fasilitas dasar yang memadai, dengan konsep penginapan glamping dan cabin yang menjadi daya tarik utama. Namun, keterbatasan lahan parkir masih menjadi kendala yang perlu ditangani agar tidak mengganggu kenyamanan wisatawan.
4 Kelembagaan	Dalam hal kelembagaan, diwakili oleh peran Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dan Paguyuban Riverside Rahong yang menjadi wadah koordinasi antar pelaku wisata. Keduanya berfungsi memperkuat kerja sama, menjaga kualitas pengelolaan, serta mendorong pengembangan pariwisata berkelanjutan di tingkat lokal. Dukungan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung juga berperan dalam pembinaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata di desa ini.

Secara keseluruhan, sinergi antara keempat komponen tersebut menunjukkan bahwa Desa Pulosari memiliki potensi besar sebagai desa wisata berbasis alam dan petualangan. Meskipun masih menghadapi kendala dalam aspek infrastruktur dan pengelolaan kelembagaan, potensi wisata di desa ini dinilai kuat untuk dikembangkan secara berkelanjutan dan berdaya saing.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung memainkan peran penting dalam pengembangan Desa Pulosari sebagai desa wisata, melalui tiga fungsi utama

yaitu sebagai motivator, fasilitator, dan dinamisator. Ketiga peran ini saling melengkapi dan menjadi landasan dalam mendorong penguatan kapasitas masyarakat, peningkatan infrastruktur pariwisata, serta pengembangan inovasi dan kolaborasi lintas sektor.

Sebagai motivator, Dinas berupaya menumbuhkan semangat dan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengelolaan wisata melalui pelatihan dan pembinaan sumber daya manusia, meskipun implementasinya belum merata di seluruh destinasi. Sebagai fasilitator, Dinas berperan dalam menyediakan sarana prasarana, kemudahan perizinan, serta dukungan koordinasi antar pihak, namun sebagian besar pengelola wisata masih bergantung pada inisiatif mandiri. Sedangkan sebagai dinamisator, Dinas mendorong inovasi dan kolaborasi antar pelaku wisata, komunitas, dan pihak swasta, meski perannya masih lebih kuat di kawasan tertentu seperti Rahong dan belum merata di seluruh destinasi di Desa Pulosari.

Temuan penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara peran ideal dan praktik di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan strategi penguatan peran Dinas secara lebih sistematis melalui pembinaan berkelanjutan, pengembangan inovasi berbasis komunitas, serta promosi digital terpadu. Upaya ini diharapkan dapat mewujudkan Desa Pulosari sebagai desa wisata yang mandiri, inovatif, berdaya saing, dan berkelanjutan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2022 tentang Desa Wisata.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Khair, D. P. (2025). Dinamika Hubungan Antara Wisatawan Dan Masyarakat Lokal Serta Dampaknya Terhadap Ekonomi Keluarga. *JURNAL ECONOMINA*, 127-134.
- Ade Jafar Sidiq, R. R. (2017). Pengembangan desa wisata berbasis partisipasi masyarakat lokal di desa wisata Linggarjati Kuningan, Jawa Barat. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, (p. 38).
- Anggarini, D. R. (2021). Kontribusi UMKM sektor pariwisata pada pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung 2020. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 345-355.



- Anik Widiastuti, A. S. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengembangan Desa Wisata Nganggring Sleman. *Jurnal Ilmiah WUNY*.
- Anjarima Devitri Kase, D. S. (2023). Resiliensi remaja korban kekerasan seksual di Kabupaten Timor Tengah Selatan: Analisis Model Miles dan Huberman. *INNER: Journal of Psychological Research*, 301-311.
- Bambang Suharto, L. J. (2024). *Pariwisata Berkelanjutan: Prinsip, Perspektif, dan Praktik*. . Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Benjiro Lepar, W. S. (2024). Strategi Pengembangan SDM untuk Keberlanjutan Desa Wisata Cikolelet, di Banten. *Jurnal Pariwisata dan Perhotelan*, 15-15.
- Deviana Safitri, A. T. (2025). KOMUNIKASI PEMASARAN DIGITAL UNTUK MEMBANGUN CITRA DAN DAYA TARIK DESA WISATA MEKARLAKSANA CIKANCUNG KABUPATEN BANDUNG. *URNAL LENSEA MUTIARA KOMUNIKASI*, 69–81. <https://doi.org/10.51544/jlmk.v9i1.5917>.
- Dewi, A. R. (2021). Pengembangan Panduan Peran dan Fungsi Top Manajer Keperawatan di Rumah Sakit. *Journal of Telenursing (JOTING)*, 8-19.
- Gratia Wirata Laksmi, E. T. (2024). Pengembangan Potensi Desa Wisata Berbasis Ekonomi Kreatif untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat. *Dharma: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 40–63. <https://doi.org/10.35309/dharma.v5i1.318>.
- I. Made Darma Oka, M. S. (2021). Warisan cagar budaya sebagai ikon desa wisata Kaba-Kaba, Kabupaten Tabanan, Bali. *Mudra Jurnal Seni Budaya*, 163-169.
- Mandala, edward ., Rinah, S. A. ., Effendi, D. ., & Sanjaya, I. D. . (2023). Strategi Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat Lokal di Kampung Tanjung Siambang Kelurahan Dompok Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 3(2), 717-733. <https://doi.org/10.56552/jisipol.v3i2.76>
- Margaretha, R. (2024). Strategi capacity building dalam pengelolaan pariwisata berkelanjutan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (JEBMA)*, 248-256.
- Marlina, N. (2019). Kemandirian masyarakat desa wisata dalam perspektif community based tourism: Studi kasus Desa Ketengger, Kabupaten Banyumas. *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 17-26.
- Meyranda Syahputra, A. N. (2025). Peran Pokdarwis dalam Pengembangan Potensi Desa Wisata dan Meningkatkan Ekonomi Masyarakat di Desa Resun. *Jurnal Masyarakat Madani Indonesia*, 31-40.



- Pitana, I. G. (2009). *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Yogyakarta: Andi.
- Poni Sukaesih Kurniati, S. N. (2023). Kebijakan Pemerintah Dalam Pembangunan Dan Pengembangan Pariwisata Di Wilayah Kota Bandung. *Prabu: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1-16.
- Raintung, A. S. (2021). Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Desa Mobuya Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow. *Governance*.
- Ramdhani, M. (2021). *Metode Penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara (CMN).
- Risnita Asrulla, M. S. (2023). Populasi dan sampling (kuantitatif), serta pemilihan informan kunci (kualitatif) dalam pendekatan praktis. *Jurnal Pendidikan Tambusa*, 26320-26332.
- Sa'di, F. A. (2024). Analisis Perencanaan Inovasi Pemerintahan Desa dalam Pengembangan Pariwisata di Desa Tapak Kabupaten Magetan. *JPkM: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 56-67.
- Siti Romdona, S. S. (2025). Teknik pengumpulan data: Observasi, wawancara dan kuesioner. *JISOSEPOL: Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi dan Politik*, 39-47.
- Sri Endah Nurhidayati, L. M. (2025). *Pesona Pariwisata Indonesia (Potensi, Pengembangan, dan Inovasi Membangun Destinasi Pariwisata Indonesia*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Sugiana, A. G. (2013). Kerangka Kerja Pengembangan Aset Pariwisata Dari Model Triple Helix Hubungan Akademia-industri-pemerintah. *Orasi Bisnis: Jurnal Ilmiah Administrasi Niaga*.
- Syarifuddin, D. (2024). Transformasi Kampung Wisata Bunisari: Paradigma Pengembangan Partisipatif. *JURNAL PARADIGMA: Journal of Sociology Research and Education*, 201-212.
- Viona Amelia, D. P. (2025). Peluang Dan Tantangan Pengelolaan Desa Ekowisata Berbasis Masyarakat Di Desa Wisata Tegal Loegood. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 10-10.
- Waruwu, M. (2024). Pendekatan penelitian kualitatif: Konsep, prosedur, kelebihan dan peran di bidang pendidikan. *Afeksi: Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan*, 198-211.

